

SISTEM PENGGANTIAN KEPALA NEGARA, KHOLIFAH, AMIR AL-MU'MININ DAN IMAM MASA ABU BAKAR AS-SHIDDIQ DAN UMAR BIN KHATTAB

Hendri Yahya Saputra¹, Imran Simanjuntak²

Email: saputrahendryyahya@gmail.com, hariri_production@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sistem penggantian kepemimpinan pada masa Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar bin Khattab dalam konteks kepemimpinan Islam awal. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses pemilihan Khalifah (pemimpin) dilakukan, peran dan tanggung jawab Khalifah, serta pengaruh sistem penggantian kepala negara terhadap stabilitas politik dan sosial masyarakat pada masa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis historis dan komparatif, dengan menggunakan sumber-sumber primer seperti sejarah Islam dan literatur hadis. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif teologis dan hukum Islam terkait dengan konsep Khalifah dan Amir al-Mu'minin sebagai pemimpin umat Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik dan sosial dalam pemilihan kepemimpinan pada masa Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi konteks kepemimpinan modern dan sistem pemerintahan dalam memahami prinsip-prinsip suksesi kepemimpinan dalam Islam.

Kata kunci: Khalifah, Amir Al-Mu'minin, Kepemimpinan Islam

Abstract: This research aims to investigate the leadership replacement system during the time of Abu Bakar as-Siddiq and Umar bin Khattab in the context of early Islamic leadership. The main focus of this research is to understand how the process of selecting the Caliph (leader) was carried out, the role and responsibilities of the Caliph, as well as the influence of the system of replacing heads of state on the political and social stability of society at that time. The research method used is historical and comparative analysis, using primary sources such as Islamic history and hadith literature. This research also considers Islamic theological and legal perspectives related to the concept of the Caliph and Amir al-Mu'minin as leaders of the Muslim community. It is hoped that the results of this research will provide a better understanding of the political and social processes in leadership selection during the era of Caliphs Abu Bakar as-Siddiq and Umar bin Khattab. The implications of this research can provide insight into the context of modern leadership and government systems in understanding the principles of leadership succession in Islam.

Key Words: Caliph, Amir Al-Mu'minin, Islamic Leadership

I. Pendahuluan

Mengenai sistem penggantian kepala negara, Khalifah, Amir al-Mu'minin, dan Imam pada masa Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar bin Khattab dapat dimulai dengan konteks pentingnya pemahaman terhadap sistem politik dan kepemimpinan dalam sejarah awal Islam. Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah dua figur utama yang memainkan peran krusial dalam pembentukan dan pengembangan sistem pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Sejarah awal Islam menunjukkan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul kebutuhan untuk mengangkat seorang pemimpin yang akan memimpin umat Islam secara politik dan spiritual. Proses pemilihan Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar as-Shiddiq, menjadi titik awal penting dalam sejarah kepemimpinan Islam karena merupakan momen di mana umat Muslim mengalami transisi dari otoritas Nabi Muhammad SAW ke kepemimpinan manusia.

Pendahuluan juga dapat menjelaskan bahwa sistem penggantian kepala negara dan Khalifah pada masa Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar bin Khattab tidak hanya mengandung dimensi politik, tetapi juga memiliki aspek religius yang sangat penting. Pemilihan Khalifah tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan politik atau suksesi turun temurun, tetapi juga mempertimbangkan kualitas spiritual dan keadilan sosial dari calon pemimpin.

Selain itu, pendahuluan dapat mencakup pengenalan terhadap konsep-konsep seperti Amir al-Mu'minin (Pemimpin Orang Mukmin), yang menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan hanya sekadar wewenang politik, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual yang besar terhadap umat Muslim.

Dalam konteks penggantian kepala negara dan sistem kepemimpinan pada masa Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar bin Khattab, pendahuluan juga dapat membahas bagaimana konsep suksesi kepemimpinan ini telah memberikan landasan bagi pengembangan pemerintahan dan hukum Islam selanjutnya. Hal ini mencakup bagaimana kebijakan-kebijakan mereka mempengaruhi stabilitas politik dan sosial umat Islam pada masa itu, serta relevansinya dengan tantangan-tantangan kepemimpinan modern.¹

Secara keseluruhan, pendahuluan harus memberikan gambaran yang jelas tentang konteks sejarah, pentingnya sistem penggantian kepala negara dalam Islam, serta peran krusial Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar bin Khattab dalam pembentukan dan pengembangan sistem kepemimpinan

II. Pembahasan

2.1. Terbentuknya Sistem Kekhalifahan

Dengan wafatnya Nabi maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spritual dan temporal. (duniawi) dan berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi. Dan situasi tersebut tidak akan terulang kembali, karena menurut kepercayaan Islam, Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Tuhan yang terakhir. Sementara itu, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa diantara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat.¹

Diadakanlah pertemuan di Saqifah. Abubakar, Umar r.a., hadir dan beberapa orang sahabat dari kalangan muhajirin, namun beberapa tokoh besar tidak hadir dalam pertemuan itu, termasuk Ustman dan Ali, r.a., pertemuan itu mirip dengan pertemuan nasional atau muktamar luar biasa yang membicarakan nasib umat, meletakkan institusi politik yang baru yang akan menjadi landasan operasional institusi tersebut.

Hasil terbesar pertemuan itu adalah berdirinya institusi kekhalifahan, yang sejak saat itu menjadi model pemerintahan Islam, baik dalam bentuk yang sama maupun dalam bentuk yang sedikit berbeda. Materi yang dibahas dalam pertemuan Saqifah tersebut mengundang analisis dari seorang penulis Barat, "pertemuan itu mengingatkan secara dekat kepada muktamar politik di era modern yang didalamnya berlangsung perdebatan-perdebatan politik yang menggunakan metode-

¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran)*, (Jakarta: UI Press, 1993), 1

metode perdebatan modern, perdebatan tersebut antara lain. Pertama, teori membela kalangan Ansor yang mengklaim diri mereka sebagai pihak yang berhak untuk memegang jabatan kekhalifahan, dengan berbagai dalil, "merekalah yang membela Islam, menjaganya dengan jiwa dan harta, memberikan tempat dan pertolongan dan merekalah penduduk asli madinah, klaim tersebut dinyatakan sebagai teori politik pertama yang timbul dalam sejarah pemikiran Islam.²

Kedua, adalah bantahan atas teori pertama, pembelaan atas hak kaum muhajirin atas jabatan kekhalifahan dan membuktikan mereka lebih berhak atas jabatan kekhalifahan dibandingkan dengan yang lain—seperti diungkapkan Abu Bakar r.a., pihak yang pertama kali menyembah Allah SWT diatas permukaan bumi—kami adalah orang-orang kepercayaan Nabi dan keluarga beliau, dan yang bersabar bersama beliau dalam menerima penganiayaan yang keras dari kaumnya dan pendustaan mereka. Dalam retorika pembelaan atas hak kaum muhajirin itu, lahir pula untuk pertama kali pemikiran tentang keutamaan suku Quraisy; "para imam (pemimpin) dari kalangan Quraisy". Dan hal itu menjadi landasan teori pemilihan kaum Quraisy atas jabatan khalifah.

Berkembang pula teori lain yang dikemukakan oleh Habbab bin Mundzir bin Jamuh, berupa kemungkinan pemecahan kepemimpinan atau adanya beberapa kepala negara sekaligus, misalnya dengan mengangkat dua khalifah sekaligus, yaitu saat masing-masing berkata "dari kami ada pemimpin tersendiri dan dari kalian ada pemimpin tersendiri pula". Akan tetapi dari sinilah lahir kesepakatan atau konsep yang amat penting yaitu sistem pemilihan kepala negara dilakukan dengan baiat, atau dengan kata lain pemilihan. Dan secara faktual tidak menerima pemilihan melalui metode pewarisan.³

2.2. Sistem Pemilihan Kepala Negara

Sejarah tidak pernah menyebutkan adanya seseorang yang mengklaim adanya teks dari Nabi yang menunjuk seseorang atau sebuah kelompok keluarga tertentu untuk mengemban jabatan kekhalifahan. Klaim-klaim seperti ini muncul setelah pertemuan hari Saqifah dari golongan Syi'ah yang secara fanatik loyal (tasyayyu) kepada Ali r.a., serta keturunannya. Oleh karena itu, merupakan kesepakatan final bagi kelompok Ahlus Sunnah—dan mereka merupakan kelompok mayoritas umat Islam—dan disepakati juga pendapat mereka dalam hal ini oleh kelompok muktazilah, murjiah, dan khawarij bahwa jalan menuju keimamahan atau kekhalifahan yang konstitusional atau bahwa sumber kekuasaan khalifah hanya dapat dicapai melalui prosedur pemilihan umum oleh umat, yang dicerminkan dengan prosedur pembaiatan. Dengan demikian, umat merupakan dasar legitimasi kekuasaan/pemerintahan.⁴

Salah satu kelompok kaum muslimin, kelompok minoritas, berkeyakinan bahwa sebenarnya Rasulullah telah menunjuk pengganti beliau, dan calon tersebut adalah keponakannya, 'Ali.⁵ Menurut mereka, penunjukan tersebut dilakukan Nabi dalam perjalanan beliau kembali dari Haji Wada', pada tanggal delapan belas Dzulhijjah, tahun kesebelas hijriah (632) di suatu tempat yang bernama Ghadir Khumm (kolam Khumm), dimana beliau membuat pernyataan bersejarah yang telah diriwayatkan dalam berbagai versi, yang paling terkenal diantaranya menyatakan bahwa Nabi mengatakan : "barangsiapa yang menganggapku sebagai pemimpin (mawla), mulai saat sekarang hendaklah menganggap 'Ali sebagai pemimpinnya". Kelompok ini terkenal dengan nama Syi'ah.

Kelompok lain yang dekat dengan mereka berpendapat warisan kepemimpinan haruslah diserahkan kepada 'Abbas, paman Nabi, dengan alasan bahwa jika persyaratan mutlak bagi pengganti Nabi tersebut adalah bahwa ia harus termasuk famili beliau, maka 'Abbas, yang lebih tua daripada 'Ali, memiliki hak yang lebih besar untuk menjadi pengganti Nabi, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa diantara "mereka yang termasuk sanak kerabat," sebagai lebih utama dari yang lain (QS, al-Anfal, 8:75)

Tetapi, pandangan Syi'ah tidaklah semata-mata mempertimbangkan kualitas-kualitas pribadi 'Ali. Mereka menyatakan bahwa tidaklah masuk akal ditinjau dari sifat keadilan dan kasih

²*Ibid.*, 2-3

³Syamruddin Nasution, *Sejarah Perkembangan Peradaban Islam*, (Pekan Baru: CV. Asa Riau, 2017), 7

⁴M. Dhiyauddin Rais, *Teori Politik Islam (terjemahan)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 14

⁵Amin Samsul Munir, *Sejarah Perkembangan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), 27

sayang (luthf) Tuhan terhadap ummat manusia jika dia membiarkan masalah kepemimpinan (imamah) ini tanpa keputusan. Pertimbangan rasional yang membuat perlunya Tuhan mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi juga menuntut bahwa dalam ketidakhadiran rasul-rasul tersebut, haruslah ditunjuk pemimpin-pemimpin yang tak bercacat untuk membimbing pengikut mereka.⁶

Kaum Syi'ah juga berargumentasi, terutama dalam menanggapi kritik-kritik dari pihak-pihak yang mempertahankan prinsip pemilihan bagi pengganti-pengganti Nabi—bahwa masalah kepemimpinan ummat adalah masalah yang terlalu vital untuk diserahkan begitu saja pada musyawarah manusia-manusia biasa yang bisa memilih orang yang salah untuk kedudukan tersebut, dan karenanya bertentangan dengan tujuan wahyu ilahi. Hanya Allah-lah yang bisa mengenali individu-individu yang memiliki sifat-sifat berilmu, tak bercacat dan tak mungkin keliru (ishmah) dan dengan demikian dapat menjamin kejayaan wahyu-wahyu-Nya dengan menjadikan individu-individu tersebut dikenal melalui utusan-utusannya. Disinilah masalah-masalah mengenai pribadi-pribadi memasuki perdebatan, karena kaum Syi'ah berpendapat bahwa hanya orang-orang yang berhubungan dekat, atau mempunyai tali kekeluargaan dengan Nabi saja yang memiliki kualitas-kualitas seperti itu, dan orang ini tak lain adalah 'Ali dan keturunannya.⁷

Kelompok Ahlu sunnah secara keseluruhan—yang nota bene adalah kelompok mayoritas umat Islam—berpendapat bahwa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin sah dan *legitimate* menurut prinsip-prinsip syariat. Berangkat dari premis ini, mereka berpandangan bahwa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dapat dijadikan contoh atau prototipe yang menjadi sumber kaidah fundamental, teladan inspiratif, dan landasan-landasan pemerintahan Islami. Tidak mengherankan, karena fase ini merupakan periode para sahabat, yang nota bene adalah orang-orang yang hidup semasa dengan Rasulullah saw., yang menemani beliau dan turut serta didalam membangun negara bersama Rasulullah beserta kaum mukmin.

2.3. Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin

Apa yang terjadi pada pertemuan Saqifah, baik beberapa pendapat-pendapat serta kesimpulan yang dihasilkan pada pertemuan tersebut. Tidak terdapat silang pendapat antara berbagai riwayat bahwa pertemuan itu berakhir dengan terpilihnya Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama dalam Islam. Berbagai riwayat juga sepakat bahwa pemilihan itu dikuatkan dan diputuskan dengan baiat umum didalam masjid pada keesokan harinya. Setelah pebaiatan, Abubakar naik ke atas mimbar dan menyampaikan khotbah pelantikan dihadapan para jamaah. Khotbah itu merupakan khotbah pertama yang menerangkan sistim pemerintahan Islam dan Abubakar berkata—iniilah teks khotbah tersebut.⁸

Abubakar berkata : setelah mengucapkan tahmid dan pujian kepada Allah "Ammma ba'du, Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah dijadikan wali (pemimpin) untuk kamu sekalian, padahal aku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Jika aku melakukan kebaikan, bantulah aku, dan ketika aku melakukan kebatilan luruskanlah aku. Kejujuran merupakan perwujudan amanat, sedangkan kebohongan berarti pengkhianatan. Si lemah diantara kalian dalam anggapanku adalah si kuat, hingga aku mampu memberikan haknya dengan izin Allah dan si kuat diantara kalian adalah si lemah bagiku hingga aku mampu merampas hak orang lain darinya dengan izin Allah. Tidak seorangpun diantara kalian yang meninggalkan jihad dijalan Allah, karena sesungguhnya tidak ada satu kaumpun yang meninggalkan jihad kecuali Allah timpakan kepada mereka kehinaan, dan tidaklah merajalela perbuatan keji pada suatu kaum kecuali Allah sebarluaskan dalam kalangan kaum itu berbagai musibah. Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasul-Nya, dan ketika aku berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kalian tidak harus lagi taat padaku".⁹

Didalam khotbah ini Khalifah Rasul menegaskan—dalam kapasitasnya sebagai seorang khalifah pertama dalam sejarah Islam—hak umat untuk mengoreksi pemimpinnya, imam atau kepala negara yang dinobatkannya. Umat harus mendukung seorang khalifah ketika dia berbuat suatu kebaikan, umat berhak meluruskan khalifah, mengkritik, dan memberikan saran ketika dia

⁶*Ibid*, 16

⁷Hamit Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah (terjemahan), Pimikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20*, (Bandung: Pustaka Setia, 1988), 7-8

⁸Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 51

⁹*Ibid*, 10

berlaku salah. Dan Akhirnya umat tidak berkewajiban untuk taat kecuali ketika seorang pemimpin mengikuti dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yakni perintah Islam dan Syariatnya. Maka seorang pemimpin atau khalifah bukanlah pemimpin otoriter, melainkan terikat dengan syariat Islam atau undang-undang Islam.¹⁰

Prinsip tersebut disarikan dari khotbah yang bersejarah dan universal ini, disamping beberapa prinsip lain yang dikandungnya, yaitu kesetaraan dihadapan undang-undang, kesinambungan ditegakannya jihad demi kemuliaan Islam dan pemeluknya yang abadi, keharusan untuk memuliakan perbuatan-perbuatan yang terpuji (fadhillah) demi lenyapnya kejahatan ditengah masyarakat, serta keharusan bagi seorang pemimpin untuk bersifat jujur dan memegang amanat.¹¹

D. Masa Kekhalifahan Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar Bin Khattab

Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq

Namanya Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir. Nasabnya menyatu dengan Nabi pada kakeknya yang ke-6, Murrah. Abu Bakar lahir 2 tahun beberapa bulan setelah lahirnya Rasul. Pemerintahan Abu Bakar berlangsung 2 tahun, dengan tujuan pencapaiannya saat itu adalah menghimpun persatuan umat Islam setelah perpecahan akibat banyaknya orang-orang Arab yang murtad dan juga mempersiapkan kekuatan untuk menaklukkan Persia dan Syam.¹²

Tahun 13 H di usia 63 tahun Abu Bakar meninggal dan dimakamkan di kamar Aisyah dekat Nabi. Abu Bakar adalah orang yang masuk Islam pertama kali dan termasuk Assabiqunal Awalun. Dia adalah sahabat Nabi yang paling setia dan dianggap macam saudaranya sendiri. Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda: 'Seandainya aku bisa memilih kekasih lain (selain Allah Swt) aku akan memilih Abu Bakar, padahal dia adalah saudara dan sahabatku'.¹³

Kekhalifahan Abu Bakar berdampak disegala bidang pemerintahannya. Kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq berhasil menentukan kebijakan dan berkontribusi bagi sejarah peradaban Islam. Secara umum berikut ini prestasi Abu Bakar selama menjadi Khalifah:¹⁴

1. Menertibkan kaum murtad (yang keluar dari Islam)
2. Mengajak kembali kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar
3. Menertibkan orang yang tidak membayar zakat
4. Menghempas gerakan munculnya Nabi palsu
5. Mengkodifikasi Al-Qur'an
6. Memperluas wilayah kekuasaan Islam
7. Memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke Syam
8. Mengirimkan pasukan ke Irak dan Syam

Khalifah Umar bin Khattab

Bernama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd al-'Uzza bin Riyah bin Qurth bin Razah bin'Adiy bin Lu'aiy al-Qurasyiy al-'adawiy. Umar berasal dari golongan keluarga kelas menengah, Umar putra dari Khattab dan Khatmah. Dia lahir di Mekah sekitar 584 M atau 13 tahun setelah lahir Nabi Muhammad Saw dan terkenal sebagai orang yang lemah lembut namun tegas, berani, tinggi, kuat, serta piawai dalam berkuda dan bergulat. Umar bin Khattab merupakan Khulafaur Rasyidin kedua yang diangkat sebagai Khalifah melalui musyawarah. Abu Bakar-lah yang mengusulkan agar Umar menjadi penggantinya dan kemudian mendapat persetujuan dari umat Islam. Terpilihnya Umar bin Khattab berdasarkan oleh peristiwa Tsaqifah Bani Saidah, pemuka Ansar dan kaum Muhajirin mengaku sebagai kelompok yang sah jadi khalifah, dan saat itu Islam baru saja menertibkan kaum murtad.¹⁵

¹⁰Sinn Ahmad Ibrahim Abu, *Manajemen Syariah Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), 123

¹¹Farag Fouda, *Kebenaran Yang Hilang (sisi kelam praktik politik dan kekuasaan dalam sejarah kaum Muslim)*, (Jakarta: PT Rosdakarya, 2003), 67

¹²Susanto Musyirifah, *Sejarah Islam Klasik*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 41

¹³Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 77

¹⁴Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Bagaskara, 2011), 68

¹⁵Ahmad Al-Usiry, *Sejarah Islam Sejak Nabi adam Hingga Abad XX*, (Jakarta: Akbar Media. 2010), 21

Kepemimpinan Umar berprinsip demokratis dalam pemerintahannya, dia mementingkan hak rakyat, bahkan merevisi dan mengkaji ulang kebijakan yang berlaku jika diperlukan untuk mencapai kebaikan umat Islam. Umar bin Khatthab menetapkan sistem pembayaran upah, gaji dan pajak yang mulai diterbitkan dan diatur. Pengadilan juga dibentuk untuk memisahkan lembaga yang yudikatif dari eksekutif dan kepolisian pertama dibentuk pada masa Umar.¹⁶

Pemimpin tegas dan berani yang dijuluki singa padang pasir ini wafat dihari Rabu tanggal 25 dzulhijah 23 H/644 M. Umar meninggal 3 hari setelah ditikam ketika menjadi imam sholat subuh oleh budak Majusi bernama Abu Lu'luah, milik Almughirah bin Syubah yang diduga dendam serta mendapat perintah dari kalangan Majusi.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pemerintahan kekhilafahan dipimpin oleh seseorang yang disebut sebagai khalifah. Khalifah diangkat oleh umat melalui bai'at. Seorang khilafah bisa dikoreksi dan diprotes oleh umat jika kebijakannya menyimpang dari ketentuan syariat.
2. Proses pemilihan khalifah diawali dengan pemilihan kandidat oleh ahlul halli wal aqdi (Majelis Umat), para kandidat diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara syar'i hingga menyisakan satu orang saja.
3. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah, pemimpin menggunakan teori ekologis, dimana sahabat yang dipilih sebagai kandidat khalifah memiliki kualitas yang mumpuni dan memiliki kesetiaan dalam memperjuangkan Islam dan umat Islam.

B. Saran

Untuk para pembaca makalah ini mohon kiranya untuk memberikan kritik dan saran serta melanjutkan makalah ini dengan tujuan menambah materi dan perbaikan pada penulisan.

¹⁶A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), 101

¹⁷*Ibid.*, h. 69

DAFTAR PUSTAKA

- Enayat, Hamid. 1988. *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah* (terjemahan) *Pemikiran Politik Islam Modern menghadapi Abad ke-20*, Bandung: Pustaka Setia.
- Fouda, Farag. 2003. *Kebenaran Yang Hilang (sisi kelam praktik politik dan kekuasaan dalam sejarah kaum Muslim)*. Jakarta: PT Rosdakarya.
- Musda, Mulia. 2001. *Negara Islam : Pemikiran Politik Husain Haikal*. Jakarta: Paramadina.
- Nasution, Harun. 2001. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Rais, M. Dhiauddin. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sjazzdali, Munawir. 1980. *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta Universitas Indonesia Press.
- Munir, Amin Samsul. 2009. *Sejarah Perkembangan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Afzalur, Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Abu, Sinn Ahmad Ibrahim. 1996. *Manajemen Syariah Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Musyrifah, Susanto. 2020. *Sejarah Islam Klasik*. Jakarta: Prenada Media.
- Yatim, Badri. 1993. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Abdul. 2011. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Al-Usiry, Ahmad. 2010. *Sejarah Islam Sejak Nabi adam Hingga Abad XX*. Jakarta: Akbar Media.
- A., Syalabi. 1983. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Nasution, Syamruddin. 2017. *Sejarah Perkembangan Peradaban Islam*. Pekanbaru: CV. Asa Riau.